

SABTU, 21 OKTOBER 2017

Perekat Komunitas Jawa Tengah

# Pilgub Jateng Tanpa Pemantau Independen

**SEMARANG** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong masyarakat berpartisipasi aktif menjadi pemantau pemilu.

Apalagi di Jawa Tengah, sudah sejak Pilkada 2015 hingga kini, tidak ada satu kelompok atau elemen masyarakat yang bergerak menjadi lembaga pemantau pemilu. Padahal, perannya cukup penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilihan umum.

Anggota KPU Pusat Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Wahyu Setiawan mengatakan, saat ini pendaftaran lembaga pemantau pemilu untuk Pilgub dan pemilihan bupati/wali kota di tujuh kabupaten di Jateng 2018 sudah dibuka.

Pendaftaran dibuka sejak 12 Oktober. Pendaftaran akan ditutup 11 Juni 2018, menjelang coblosan.

KPU berharap, masyarakat dan ormas dapat berpartisipasi. Mendaftar sebagai pemantau dan kemudian ikut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum. "Sejak Pilkada 2015 untuk Jawa Tengah, tidak ada yang daftar," ujar Wahyu setelah



SM/dok

## Wahyu Setiawan

Sosialisasi Pemantau Pemilu bersama sejumlah elemen masyarakat di kantor KPU Jateng, Semarang, kemarin.

Syarat kelompok masyarakat untuk menjadi lembaga pemantau pemilu, di antaranya bersifat independen, mempunyai sumber dana jelas, dan melengkapi kelengkapan administrasi di KPU.

Selama ini, kendala utama kelompok masyarakat adalah kekurangan sumber dana. Wahyu menegaskan, KPU tidak bisa memfasilitasi dana. "Lembaga pemantau pemilu itu salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Sebenarnya ada ormas yang punya dana besar dan ja-

ringan. Kami berharap, mereka bisa mendukung," imbuh dia.

## Peran Penting

Pakar politik Undip Nur Hidayat Sardini mengatakan, pemantau pemilu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Sebab tidak semua wilayah dapat dipantau oleh pihak penyelenggara. Fungsi pengawasan bisa dibantu lembaga pemantau. Dia miris dengan jumlah pemantau yang terus berkurang setiap pemilihan umum.

Menurut dia, di negara yang telah dewasa, proses demokrasi dalam pemilu akan kredibel bila dipantau lembaga pemantau independen.

"Pemantau pemilu harus terus hidup sebagai bagian dari keseimbangan di dalam membangun demokrasi. Jika problem karena dana, pemerintah seharusnya membantu. Partai saja dibantu, kenapa pemantau pemilu tidak," tegas dia.

Dia usul agar lembaga pemantau pemilu dibiayai negara. Dana pembiayaan bisa diambil dari anggaran pemberdayaan masyarakat seperti di Kesbangpol. (K23-50)